IMPLEMENTASI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DI PTUN MAKASSAR

H. Sudirman L¹, Hasanuddin Hasim², Abdul Hafid³

Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Parepare

Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Soreang, Parepare, Sulawesi Selatan 91131

¹sudirman164@yahoo.co.id, ²hasanalhasim@gmail.com, ³abdulhafid.msi77@gmail.com

Abstract, Judges as the main actors or central figures in the judicial process are always required to sharpen conscience, maintain integrity, moral intelligence and increase professionalism in upholding law and justice for the community at large. Types of normative legal research or library research (Library Reserch). Normative legal research is legal research conducted by examining library materials. The results of the study indicate that the Makassar State Administrative Court in carrying out supervision is directed at maintaining efforts to carry out the duties of the judiciary in accordance with the applicable plans and regulations, controlling that the administration of justice be managed in an orderly, orderly manner and guaranteeing the realization of good public services for justice seekers. . At the Makassar State Administrative Court, the deputy chairperson acts as the coordinator of the implementation of supervisory duties by coordinating the supervisory judges of the field and the supervisory and observer judges (KIMWASMAT) who have been appointed, assisted by several substitute clerks and staff as administrative staff. Internal supervision is supervision from within the judiciary itself which includes 2 (two) types of supervision, namely: inherent and routine / regular supervision.

Keywords: Implementation, Supervision, Ethics, Code of Ethics and Code of Conduct, Judge PTUN Makassar.

Abstrak, Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library Reserch). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan. Pada pengadilan tata usaha negara makassar, wakil ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para hakim pengawas bidang dan hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan staff sebagai tenaga administrasi. Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: pengawasan melekat dan rutin/regular.

Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, Etika, Kode Etik dan Pedoman Perilaku, Hakim PTUN Makassar.

Pendahuluan

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hal itu merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum. Kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang. Sebagaimana diatur dalam lafal sumpah seorang hakim. dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi. Sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Kode etik itu penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi kelompok profesi (demikian pula para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan.

Setiap bentuk profesi mempunyai problem pembinaan sendiri. Boleh jadi ilham tentang pengalaman di masa yang lalu, kode profesi yang dijalani akan membentuk situasi tertentu. Luhur tidaknya sebuah profesi tergantung pada situasi saling percaya yang terkandung kehidupan sosial.² Dalam menjalankan tugas seorang hakim haruslah sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana telah di sumpah menjadi hakim yang harus menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut.

Agar independensi seorang hakim selalu terjaga, maka seorang hakim dituntut untuk secara intensif memerhatikan kejujuran dan integritasnya. Sebab hal ini adalah fondasi keadilan yang harus selalu ditegakkan. Orang-orang yang berperkara terkadang berusaha merusak integritas hakim yang menangani perkara mereka dengan berbagai cara. Untuk mencapai tujuan itu orang-orang tersebut akan mencari cara agar mereka mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan dengan hakim. Orang-orang tersebut merusak integritas hakim dengan mendapatkan kemurahan hati yang tidak semestinya dalam persidangan, dan mengeksploitasi hubungan mereka dengan hakim.

Untuk menghindari hal yang sering dialami oleh seorang hakim tersebut, maka mereka harus melakukan usaha terbaik untuk menolak berbicara dengan orang-orang seperti itu,

¹Lihat Pembukaan Keputusan Barsama MA & KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

²E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum* (Cet I; Jogjakarta : Kanisius, 1995), hlm. 35.

supaya integritas mereka tetap terlindungi. Jika integritas seorang hakim atau menjadi perbincangan, akan sulit baginya untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik karena tidak akan ada lagi yang percaya terhadap kejujurannya.³

Seorang hakim pengadilan tata usaha negara haruslah mempunyai kadar ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu hukum tata negara saja tetapi juga harus mengetahui hukum umum dan perangkat hukum yang berlaku serta mampu mengimbangi perkembangan hukum itu sendiri dalam arus globalisasi sekarang ini.

Hakim haruslah mempunyai wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan secara akademisi untuk mengantisipasi berbagai problem hukum dalam melaksanakan tugasnya.⁴

Hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

Mengenai peranan hakim dalam menegakkan kepastian hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari kemenangan, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.⁵

Hal-hal tersebut pada saat ini menjadi problem besar di Negara ini. Hukum bisa dipermainkan dengan formalitas-formalitas belaka dan dilepaskan dari ruh etikanya. Pada para penegak hukum bukan lagi mencari kebenaran melainkan bagaimana mencapai kemenangan riil sesuai dengan yang diinginkan dirinya maupun klien yang memesannya.

Penyelesaian kasus-kasus hukum dipengadilanpun tidak lagi mengandalkan kekuatan argumen yang murni hukum melainkan diselesaikan melalui lobi-lobi politik dan negosiasi tentang cara penyelesaian atau materi putusan yang dapat dinilai dengan harga uang tertentu.⁶

Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain pengawasan dimaksud, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh komisi yudisial.

Hakim harus memilki integritas atas kepribadian *tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia*, serta berpengalaman di bidang hukum. Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. dalam melakukan pengawasan hakim, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. dalam hal ini terdapat perbedaan antara hasil pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

³Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (cet.II; Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 136.

⁴Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, hlm. 192.

⁵Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif* (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 275.

⁶Mohlm. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi Isu* (Cet. II; Jogjakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 90.

Pelaksanaan tugas tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara. Ketentuan mengenai pengawasan eksternal hakim diatur dalam undang-undang.

Dalam Melaksanakan pengawasan eksternal, pasal 13, 14 dan 20 UU Nomor 18 Tahun 2011 disebutkan Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Komisi Yudisial berwenang :

- a. Menerima dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim;
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim;
- c. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d;
- f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- h. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:

- a. Menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
- c. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.⁷

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefenisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa istilah yang dianggap penting.

1. Pengawasan adalah memperhatikan, memeriksa, segala sesuatu yang sedang berlangsung dalam penyelidikan.⁸
2. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

⁷Lihat UU No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, dan Pasal 12F

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional," *Situs Resmi*. <http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/> (30 Desember 2011)

⁹Pasal 12D ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

3. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰
4. Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim.¹¹
5. Pedoman Tingkah laku (*Code of Conduct*) Hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.¹²

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut maka penulis menyimpulkan bagaimana seorang hakim menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta pengawasannya. Begitupun dengan halnya hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang hakim maka hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentunya berlandaskan pada aturan yang berlaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Atas beberapa uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, untuk itu peneliti mengangkat sebuah judul Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar).

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kode etik dan pedoman perilaku hakim di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar? Dengan sub masalah sebagai berikut: Bagaimana sistem pengawasan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim di pengadilan tata usaha negara Makassar? Bagaimana penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim di pengadilan tata usaha negara Makassar?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹³ Jenis dan Sumber Data; Penelitian hukum mengenal adanya dualisme, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁴ Amirudin dan H. Zinal Asikin berpendapat, penelitian hukum normatif disebut

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹² *Ibid.*, hlm. 1.

¹³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

sebagai penelitian hukum *doctrinal* karena dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁵

Penelitian hukum empiris menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, tipe penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.¹⁶ Singkatnya kehadiran hukum di masyarakat tidak terlepas dari peranan masyarakat disekitarnya, keadaan sosial masyarakat dan perilaku masyarakat yang terkait dengan lembaga hukum.¹⁷

Karya ilmiah ini di buat penulis dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*Library Reserch*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁸ Penelitian ini mengenai Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan sistem pengawasannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.¹⁹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengintegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (*rechmatig*) dan sesuai dengan peruntukannya (*doelmatig*). perspektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

1.1. Wewenang dan Tanggungjawab Pengawasan

¹⁵ Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁶ Fajar Mukti & Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pensil Komunika, Yogyakarta, hlm. 32.

¹⁷ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

¹⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3.

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggungjawab pengawasan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, berada pada :

- a. Ketua pengadilan tata usaha negara makassar;
- b. Seluruh pejabat kepaniteraan;
- c. Seluruh pejabat struktural dilingkungan pengadilan tingkat pertama.

Pengawasan Rutin/Reguler dan Pengawasan Melekat

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga peradilan wajib menjalankan pengawasan melekat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan (Rutin/ Reguler) dalam upaya pengendalian internal.

Pada pengadilan tata usaha negara makassar, wakil ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para hakim pengawas bidang dan hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan staff sebagai tenaga administrasi.

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: pengawasan melekat dan rutin/reguler.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pengawasan rutin/reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing, pengawasan rutin/reguler meliputi: Pengawasan Keuangan; Penanganan Pengaduan; Manajemen pengadilan; Administrasi persidangan; Administrasi perkara dan Administrasi umum.

Pengawasan keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (*current audit*), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (*post audit*) yang meliputi audit ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), audit keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan audit operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);

Penanganan pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;

Manajemen pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atau pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;

Administrasi persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;

Administrasi perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan

perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;

Administrasi umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;²⁰

Kinerja pelayanan publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;

Tindak lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

1.2. Maksud, Fungsi, Bentuk dan Metode Pengawasan²¹

1.2.1. Maksud Pengawasan

Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan dalam menilai. 1.12.3.2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

1.2.2. Fungsi Pengawasan

Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya perkara yang murah.

1.2.3. Bentuk dan Metode Pengawasan.

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut.

- a. Memeriksa program kerja;
- b. menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja ;
- c. memberikan saran-saran untuk perbaikan ;

²⁰ <https://ptun-makassar.go.id/pengawasan-dan-kode-etik/>

²¹ *Ibid*

- d. melaporkan kepada pimpinan pengadilan tata usaha negara makassar;
- e. merekomendasikan kepada pimpinan pengadilan tata usaha negara makassar atau
- f. pejabat yang berkopentent terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut ;

1.3. Pelaksanaan Pengawasan²²

Pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

- a. Manajemen Peradilan: mencakup beberapa item yang ingin dicapai yaitu Program kerja, Pelaksanaan/pencapaian target, Pengawasan dan pembinaan, Kendala dan hambatan, Faktor-faktor yang mendukung, dan Evaluasi kegiatan.
- b. Administrasi Perkara: mencakup Prosedur penerimaan perkara, Prosedur penerimaan permohonan banding, Prosedur penerimaan permohonan kasasi, Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali, Keuangan perkara, Pemberkasan perkara dan kearsipan dan Pelaporan.
- c. Administrasi Persidangan Dan Pelaksanaan Putusan: terdiri dari Sistem Pembagian Perkara Dan Penentuan Majelis Hakim, Ketepatan Waktu Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara, Minutasi Perkara, dan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi).
- d. Administrasi Umum: diantaranya prihal bidang Kepegawaian, Keuangan, Inventaris, Perpustakaan, Tertib Persuratan Dan Perkantoran.
- e. Kinerja Pelayanan Publik: diantaranya terdiri dari Pengelolaan manajemen, Mekanisme pengawasan, Kepemimpinan, Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, Pemeliharaan/perawatan inventaris, Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan, Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara, Tingkat pengaduan masyarakat, Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku, dan Pelaporan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut²³

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para hakim pengawas bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para hakim pengawas merekomendasikan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

2. Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim dianggap sebagai sesuatu yang baik, karena etika dan tingkah laku hakim mempunyai kekuatan mengikat, terutama pelaksanaannya dalam lingkup pengadilan maupun di luar. Di samping itu secara yuridis dalam penerapannya dapat diterima oleh para pegawai pengadilan agama pangkajene dan secara psikologis oleh masyarakat karena ia lahir dari suatu perkara yang secara langsung terjadi dalam masyarakat. Itu artinya bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim lebih menyentuh masalah-masalah praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

Sebagaimana diketahui bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan salah satu dasar bagi hakim dalam bertingkah laku dilingkup pengadilan dan diluar lingkup pengadilan, pedoman tingkah laku (*code of conduct*) hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.²⁴

Tugas *qadhi* adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang *qadhi* harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *qadhi*. *qadhi* tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun. Ia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun.²⁵

Dalam hubungan ini Allah dalam firmanNya dalam surat al-An'am ayat 152 yang maksudnya bahwa apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu.

Dalam surat al-Maidah ayat 42 Allah swt. Memperingatkan bahwa jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil, karena sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) *Berperilaku Adil*, (2) *Berperilaku jujur*, (3) *Berperilaku Arif dan Bijaksana*, (4) *Bersikap Mandiri*, (5) *Berintegrasi Tinggi*, (6) *Bertanggung Jawab*, (7) *Menjunjung Tinggi Harga Diri*, (8) *Berdisiplin Tinggi*, (9) *Berperilaku Rendah Hati*, (10) *Bersikap Professional*.

a) Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang

²⁴<http://dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53-7973d3fe6e562bb4211f814af0cfca55.pdf> MUNAS IKAHI. ke XIII, *Kode Etik Profesi Hakim*. Bandung: 2000.

²⁵Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 32.

melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.²⁶

Bersikap adil menjadi poin pertama dalam prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal ini memperlihatkan bahwa seorang hakim sebagai “wakil tuhan” di muka bumi ini harus mampu bersikap adil terhadap perkara yang ditanganinya, tanpa memandang pihak yang berperkara. Memberikan putusan benar kepada yang benar dan menyatakan salah bagi yang salah. Setiap manusia harus memiliki sifat adil, namun khusus kepada hakim yang pada hakikatnya memang diangkat untuk menetapkan keadilan di muka bumi ini.

Dalam menjalankan tugas seorang hakim harus menjunjung tinggi keadilan. Hal tersebut bukanlah sebuah wacana belaka jika hakim dalam memutuskan perkara tetap memperhatikan asas-asas keadilan dalam proses persidangan. Diantaranya yaitu dihormatinya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), mendengarkan kedua belah pihak (*audi at alterampartem*), ketidakberpihakan (*imparsialitas*) serta prinsip persamaan perlakuan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

b) Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.²⁷

Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela, memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari Advokat, Penuntut, Orang yang sedang diadili, Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan,

²⁶ <http://www.badilag.net>, hlm. 6.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.²⁸

Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari: Advokat, Penuntut, Orang yang sedang diadili, Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

c) Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.²⁹

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Penerapan poin tersebut dijabarkan dalam tuntutan terhadap hakim untuk lebih bijaksana dalam menghadapi profesinya sebagai hakim. Misalnya Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Larangan mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut. Larangan mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

d) Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.³⁰

Menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) hakim dan badan peradilan. Hakim wajib berprilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

e) Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.³¹

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan tentang integritas dalam poin ini dapat dilihat dari beberapa contoh penerapan integritas hakim yang harus dilakukan diantaranya, Hakim tidak boleh mengadakan suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan. Hakim dilarang melakukan tawar menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

f) Bertanggung Jawab

Bertanggung bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang, tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Penerapan penggunaan predikat jabatan Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.³² Penggunaan informasi peradilan hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat

³⁰*Ibid.*, hlm. 13.

³¹*Ibid.*, hlm. 13.

³²*Ibid.*, hlm. 16.

rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

g) **Menjunjung Tinggi Harga Diri**

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.³³

Sehubungan dengan hal tersebut, Imam Mohammad bin Idris al-Shafi'i, dan beberapa ahli hukum dari kalangan Mazhab Hambali mempunyai pendapat yang berlawanan tentang keikutsertaan hakim dalam aktivitas perdagangan. Berkaitan dengan hal ini para ahli hukum tersebut berpendapat bahwa seorang hakim yang menjalankan aktivitasnya hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu seorang hakim perlu melakukan aktivitas perdagangan untuk menghidupi keluarganya dia harus melakukannya melalui seorang agen.³⁴

Umar Ibnu al-Khattab r.a. sangat tegas dalam masalah keterlibatan hakim dalam aktivitas bisnis. Berkaitan dengan hal ini beliau pernah mengatakan: "(aktivitas) perdagangan dari seorang penguasa (termasuk hakim) adalah sebuah kerugian untuk rakyatnya".³⁵

Penerapan umum tentang hakim yang menjunjung tinggi harga diri yakni hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penerapan aktifitas bisnis hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim, seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

Aktifitas lain, hakim dilarang menjadi Advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

Aktifitas masa pensiun, mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

h) **Berdisiplin Tinggi**

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat

³³*Ibid.*, hlm. 17.

³⁴Mohammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Umm* (Mesir: Al-Martaba'at al-Almairiyah, 1324 H), j. 6., hlm. 201.

³⁵*Ibid.*, hlm. 43.

pencari keadilan.³⁶ Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Poin terhadap penerapan berdisiplin tinggi, hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

i) Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.³⁷ Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Berperilaku rendah hati dilakukan seorang hakim dalam pengabdian hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Popularitas seorang hakim berjalan seimbang dengan kerendahan hati agar hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

j) Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.³⁸ Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Langkah penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim lebih ditekankan pada pemberdayaan hakim. Hal ini dilakukan, karena hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, sehingga tanpa hakim, pengadilan tidak layak sebagai lembaga peradilan. Bahkan

³⁶<http://www.badilag.net>, *loc. cit.*

³⁷*Ibid.*, hlm. 19.

³⁸*Ibid.*, hlm. 20.

dalam perkembangannya oleh sebagian masyarakat sering menghadapi hakim dalam menyelesaikan perkaranya. Artinya penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim identik dengan pengadilan itu sendiri.

Oleh karena itu hakim mempunyai eksistensi yang sangat eksistensial dalam sistem peradilan, maka dengan sendirinya fungsi hakim dalam pengadilan sangat fungsional. Artinya bahwa pelaksanaan fungsi hakim dalam pengadilan sangat menentukan citra pengadilan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa jika hakim dalam suatu lembaga peradilan tidak menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka dapat dikatakan bahwa pengadilan itu mempunyai citra buruk. Sebaliknya jika hakim dalam suatu lembaga peradilan menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara maksimal dan optimal, maka hal itu menunjukkan citra baik bagi lembaga peradilan itu. Kaitannya dengan penetapan kode etik dan pedoman perilaku hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Andi. Hasanuddin. sebagai Panitera Muda Hukum menyatakan yakni:

“Para hakim diharuskan untuk menjadi hakim yang semestinya sebagaimana keputusan mahkamah agung dan komisi yudisial tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim”.³⁹

Artinya bahwa hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dituntut kemampuannya untuk menjalankan dan menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana mestinya. Selanjutnya diperkuat pendapat Darmawangsa, sebagai Panitera bahwa:

“Penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim terkhusus hakim muda pengadilan tata usaha Negara makassar masih ada yang belum menerapkan kode etik tersebut, terlihat dari peroblematika yang dihadapinya dalam menjalankan tugas kedinasan, bagaimana beretika yang semestinya kepada atasan serta pegawai pengadilan dan bagaimana etika kepada para pencari keadilan yang semestinya yang diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.⁴⁰

Penjelasan mengenai penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim menurut Darmawangsa. bahwa penerapan yang semestinya sesuai aturan yang berlaku terkhusus kepada hakim-hakim muda Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dalam penerapannya masih belum bisa sepenuhnya menjalankan etika dan pedoman yang semestinya terhadap berperilaku di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terkhusus kepada atasan dan etika kepada para pihak dalam menyelesaikan perkara.

Selanjutnya dikatakan pula oleh ibu Abdul Razak bahwa: *“Penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim telah diterapkannya sebagaimana mestinya, karena hal tersebut menjadi kewajiban seorang hakim dalam beretika dan bertingkah laku yang semestinya dalam kehidupan seorang hakim”*.⁴¹

³⁹Andi Hasanuddin, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

⁴⁰Darmawangsa, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

⁴¹Abdul Razak, Staf Panitera Muda Hukum Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Dengan demikian penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim harus berlandaskan pada aturan yang telah ada, sebagaimana didasarkan atas jawaban dari sepuluh (10) kuisioner yang telah dibagikan kepada para kalangan di lembaga pengadilan yang berkaitan tentang penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menjawab bahwa penerapan tentang hal tersebut telah diterapkan sebagaimana mestinya.

Data tersebut menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerapkan 10 butir kode etik dan pedoman perilaku hakim yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seorang hakim. Ini artinya bahwa hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Muh. Sholeh, sebagai seorang Pengacara mengatakan: *“penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim telah diterapkan sebagaimana ketetapan mahkamah agung dan komisi yudisial”*.⁴²

Hal tersebut jelas bahwa penerapan kode etik dari 10 butir prinsip hakim pada 10 prinsip dasar yang harus diimplementasikan seorang hakim pada bagian mendengarkan kedua belah pihak. Lanjut ujarnya

“Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di lingkup gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak berperkara tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan”.⁴³

Lebih lanjut tentang langkah-langkah penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai sumber etika seorang hakim pengadilan tata usaha Negara makassar, Darmawangsa, sebagai Ketua Panitera mengatakan: *“Dalam penerapan hal tersebut telah diterapkan sebagaimana mestinya, karena telah menjadi kewajiban seorang hakim menjalankan hal tersebut”*.⁴⁴

Dengan demikian, hakim harus berani dan jeli dalam menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah diwajibkan kepada semua hakim pengadilan dalam beretika dan berperilaku yang semestinya dalam lingkup pengadilan dan diluar lingkup pengadilan.

3. Problematika Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Pada dasarnya kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan sumber pedoman tingkah laku yang dapat dioptimalkan fungsinya secara efektif oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas praatanya di lembaga pengadilan, namun sebagai seorang hakim yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, bisa jadi sebagai seorang hakim pernah mengalami yang namanya problematika dalam menjalankan

⁴²Muhl. Sholeh, Advokat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

⁴³*Ibid*, hlm. 8.

⁴⁴Darmawangsa, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

penerapan 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah menjadi panduan seorang hakim dalam berperilaku di lingkup pengadilan maupun di luar lingkup pengadilan.

Sebagai seorang hakim, khususnya bagi hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar paling tidak tanpa adanya keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang harus diterapkan tersebut harusnya hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menanamkan nilai-nilai universal hukum nasional.

Dalam menjalankan penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim, problematika yang dihadapi oleh seorang hakim yakni:

- a) Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum memahami betul maksud dan cara penerapan yang tepat tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut.
- b) Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum menyadari betul administrasi lembaga yang seharusnya ditanamkan seorang hakim dalam menjalankan prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut.
- c) Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum menyadari bahwa dasar pijakan dalam beretika dan bertingkah laku telah ditetapkan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut diperkuat dengan beberapa pendapat dari para hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang menjelaskan tentang problematika yang dihadapi seorang hakim dalam menjalankan profesinya. Seperti pendapat yang dikatakan oleh Darmawangsa, sebagai Ketua Panitera: *“kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai pedoman berperilaku seorang hakim tidak sedikit mengalami problematika dan tantangan yang dihadapi dalam proses penerapannya sebagai sumber patokan hakim”*.⁴⁵

Sehingga bukan suatu alasan untuk bersifat pesimis dalam menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai bagian tatanan hakim sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan putusan yang mencerminkan keadilan⁴⁶. Lanjut ujarinya menjelaskan bahwa: *“kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam pelaksanaannya terkadang juga sebenarnya hakim masih belum memahami betul maksud dan cara penerapan yang tepat tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, karena ada diantara hakim muda yang tidak melakukan kode etik dan pedoman perilaku hakim pada tempatnya bagaimana etika hakim kepada atasannya dan bagaimana kepada yang lain”*.⁴⁷

Sebagai pengawas kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam internal Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar merasa bahwa masih ada problematika dalam penerapan aturan tersebut. Hal itu disebabkan tidak adanya kesadaran administrasi lembaga yang ditanamkan seorang hakim khususnya hakim muda Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Senada dengan hal itu menurut Andi. Hasanuddin, sebagai Panitera Muda Hukum yang mengatakan bahwa : *“Dalam menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim tidak ada*

⁴⁵Darmawangsa, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

⁴⁶Cik Hasan Basri, MS., Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 194.

⁴⁷Darmawangsa, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

problematika yang dialaminya tergantung dari individunya dan tidak ada intervensi”.⁴⁸ Keterangan lain diperoleh dari penjelasan bapak Abdul Razak bahwa: *“Ada problematika yang dialami yakni syarat godaan dalam pelaksanaannya seperti tidak bolehnya hakim menerima sogokan dari para pihak yang berperkara”*.⁴⁹

Selanjutnya ditegaskan pula Advokat Muh. Sholeh.: *“problematika yang dihadapinya hanya syarat godaan dalam menyelesaikan perkara yang mana seorang hakim harus berlaku adil terhadap perkara yang ditanganinya”*.⁵⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa problematika yang dialami seorang hakim ada sesuai individu seorang hakim dalam menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut.

Penutup

1. Kesimpulan

Fungsi kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai aturan main seorang hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah dijadikan sebagai pijakan (dasar) bagi hakim dalam beretika dan bertingkah laku baik dalam lingkup pengadilan maupun di luar lingkup pengadilan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Problematika yang dihadapi seorang hakim dalam menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim berbeda-beda sesuai individu hakimnya, tergantung bagaimana hakim mengingat bahwa dasar pijakan dalam beretika dan bertingkah laku telah ditetapkan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai aturan main seorang hakim di Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep, harus ditempuh sesuai aturan yang ada yakni: (1) *Berperilaku Adil*, (2) *Berperilaku jujur*, (3) *Berperilaku Arif dan Bijaksana*, (4) *Bersikap Mandiri*, (5) *Berintegrasi Tinggi*, (6) *Bertanggung Jawab*, (7) *Menjunjung Tinggi Harga Diri*, (8) *Berdisiplin Tinggi*, (9) *Berperilaku Rendah Hati*, (10) *Bersikap Professional*.

2. Saran

Melihat permasalahan dan hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan dan merekomendasikan sebagai berikut: Diperlukan peningkatan profesionalisme hakim, khususnya hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, agar menjadi hakim yang ideal sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Diperlukan sosialisai kembali kepada hakim terhadap prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) *berperilaku adil*, (2) *berperilaku jujur*, (3) *berperilaku arif dan bijaksana*, (4) *bersikap mandiri*, (5) *berintegrasi tinggi*, (6) *bertanggung jawab*, (7) *menjunjung tinggi harga diri*, (8)

⁴⁸Andi.Hasanuddin, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

⁴⁹Abdul Razak, Staf PaniteraMuda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

⁵⁰Muhl. Saleh, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap professional. Diperlukannya pengawasan ekstra terhadap penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim, karena bila pelimpahan pengawasan hanya kepada ketua pengadilan saja, peneliti khawatir akan adanya hubungan emosional dan rasa ketidaknyamanan dari para hakim membuat hasil pelaporannya kepada pihak pengawas di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang nantinya berdampak terhadap laporan yang tidak sesuai fakta. Maka dalam hal ini diperlukan sebuah lembaga khusus yang mengawasi secara langsung hakim dalam kesehariannya menjalankan aturan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad, Yulianto & Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum*, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Asikin, H. Zainal & Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Basri, MS., Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Idris al-Shafi'i, bin Mohammad. *Al-Umm* Mesir: Al-Martaba'at al-Almairiyah 1324H
- Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi Isu*, Cet. II; Jogjakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mamuji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Pnenelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* , cet.II; Jakarta: Kencana, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progressif*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*, Cet I; Jogjakarta : Kanisius, 1995.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Bersama MA & KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional," *Situs Resmi*. <http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>.

www.google.com. Keputusan bersama Ketua MARI dan KYRI *tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* Jakarta: 2011.

<http://dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53-7973d3fe6e562bb4211f814af0cfca55.pdf> MUNAS
IKAHI. ke XIII, *Kode Etik Profesi Hakim*. Bandung: 2000.

<https://ptun-makassar.go.id/pengawasan-dan-kode-etik/>

<http://www.badilag.net>